PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 2, Juli (2021)
e-ISSN: 2797-0469

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KEGIATAN OPERASI PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nadhifah Dwi Lestari
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
lestarinadhifah@gmail.com

Bambang Kusbandrijo
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

Indah Murti
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam Operasi Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Hingga saat ini, penularannya masih terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja serta faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan operasi protokol kesehatan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro pada masa pandemi Covid-19 di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didasarkan pada lima indikator kinerja yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan protokol kesehatan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM) dapat dikatakan baik, namun kembali pada tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan yang dinilai kurang dalam menjalankan tugasnya yaitu jumlah sumber daya manusia (SDM).

Kata Kunci: *Kinerja, Satpol PP Prov Jatim, Penertiban, Usaha Berbasis Mikro*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tertular wabah penyakit Covid-19 yang pada saat itu berlangsung di seluruh dunia. Kasus ini pertama kali terdeteksi pada

2 Maret 2020. Salah satunya pada Wilayah Jawa Timur dimana tingkat penularan Covid-19 masih meningkat.

Penyebaran virus Covid-19 berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur saat ini telah mengambil tindakan cepat dalam menangani virus Covid-19. Namun, ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dari aturan 5M yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari keramaian, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan terkait virus Covid-19 di Jawa Timur, maka kita sebagai masyarakat Jawa Timur yang baik tentunya harus mendukung kebijakan pemerintah secara bersama-sama dan berperan aktif. Demikian pula Satpol PP Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab yaitu menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Satpol PP Provinsi Jawa Timur adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Tata kerja organisasi Satpol PP Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Satpol PP Provinsi Jawa Timur dapat berkedudukan baik dalam tingkat Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Jawa Timur memerlukannya pengukuran kinerja atau penilaian kinerja. Agar dapat mengetahui pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan tercapainya prestasi dari hasil tugas dan tanggung jawab yang telah terselesaikan. Dalam hal itu kinerja merupakan bagian yang sangat penting manfaatnya, suatu sektor publik khususnya pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah menginginkan pegawainya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh berdasarkan kemapuan yang dimiliki dari setiap masing-masing individu agar dapat mencapai hasil kinerja yang baik, tanpa kinerja yang baik dari seluruh karyawan, suatu organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Kinerja pada dasarnya mencakup sikap dan mentalitas serta perilaku karyawan yang berpandangan bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat lebih berkualitas dari pekerjaan di masa lalu, dan bahwa kinerja karyawan harus berkualitas di masa sekarang. Karyawan juga harus memiliki rasa percaya diri dan kepuasan atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dengan baik.

Penilaian kerja dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah sebagai upaya berharga untuk profesionalisasi dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan hambatan atau dorongan dan berbagai faktor keberhasilan seseorang atau instansi, sehingga dapat mengarah pada profesionalisme yaitu mampu mengoreksi kesalahan yang terjadi. telah dibuat sejauh ini. Dengan adanya penilaian tersebut dapat memberikan pelayanan publik yang baik seperti pada Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Saat ini Satpol PP Provinsi Jawa Timur fokus pada Kegiatan Patroli PPKM Berbasis Mikro.

Pada pelaksanaan Patroli PPKM berbasis Mikro, petugas menindak tegas tempat usaha yang telah melanggar instruksi Mentri dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2021 dan keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2021. Hal itu guna menghindari kerumunan pengunjungnya, seperti tempat usaha (makan/minum) maksimal pengunjung harus dibatasi 50 persen.

Ada banyak tempat usaha di kota surabaya dan terutama tempat makan dan minum yang biasanya dijadikan tempat anak-anak dan orang dewasa yang mudah untuk bersantai dan berkumpul dengan teman-teman yang mengakibatkan keramaian. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, nampaknya masyarakat masih kurang memperhatikan kondisi lingkungan dimana masih ada peluang tertular virus Covid-19 yang berdampak berbahaya bagi diri sendiri. Oleh karena itu, diadakan Patroli PPKM Berbasis Mikro.

Tujuan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM berbasis Mikro guna untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19. Adanya kegiatan ini karena masih banyaknya masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan hingga menghiraukan pembatasan kegiatan pada jam malam, terutama pada tempat makan/minum yang masih banyak melanggar peraturan jam malam. Bagi pemilik usaha seperti cafe, warkop dan sebagainya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 22.00 WIB.

Apabila ada tempat usaha yang melanggar maka dikenakan tiga sanksi yaitu sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi penutupan sementara, sedangkan bagi pengunjung diberlakukan dua sanksi yaitu, sanksi sosial dan sanksi administratif (pengambilan KTP) serta Aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya mentaati protokol kesehatan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti memfokuskan pada Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan PPKM Mikro. Peneliti juga akan melihat kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menertibkan masyarakat terkait pematuhan protokol kesehatan pada masa pandemi. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Dalam hal ini saya tertarik untuk meneliti *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2010:15) bahwa:

> *"metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triagulasi, analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi".*

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada dua jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat

yang berwenang dan juga masyarakat, seperti pemilik usaha, karyawan dan pengunjung yang merasakan pelayanan dari kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Penelitian menggunakan kedua sumber data, dengan itu peneliti dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini dimana negara indonesia merupan negara yang terpapar virus Covid-19. Dimana pemerintah terus mengupayakan dalam menangani penyebaran virus ini. Seperti halnya berbagai aparatur sipil negara seperti Satpopl PP Provinsi Jawa Timur saat ini berfokus melakukan tugasnya dalam menertibkan masyarakat mikro yang melanggar peraturan pemerintah.

Untuk dapat mnegetahui kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam penertiban protokol kesehatan PPKM mikro, maka dapat dilihat berdasarkan hasil data dimana peneliti akan menguraikan kedalam 5 aspek indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto, (2006: 50-51) diantaranya yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Dari salah satu indikator kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur yang di ukur yaitu produktivitas, diketahui bahwa pada indikator produktivitasnya Satpol PP Provinsi Jawa Timur telah melakukan tugasnya dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro dengan baik, seperti halnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi dapat dilihat masih ada masyarakat yang menghiraukan terkait penerapan protokol kesehatan serta masyarakat yang cuwek akan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kualitas Layanan

Pertama dapat dilihat dari kualitas layanan suatu organisasi publik dapat dilihat dari sumber daya manusia. Potensi yang dimiliki Satpol PP Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan/pangkat menunjukkan bahwa golongan II sejumlah 68, golongan III sejumlah 53, dan golongan IV sejumlah 11. Namun sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP Provinsi Jawa Timur dinilai kurang, namun sebagian sudah mumpuni dalam menjalankan tugasnya dan bersikap ramah tamah kepada masyarakat, namun dalam keseluruhannya masih kurang baik. Karena sumber daya manusia yang baik ialah yang selalu meningkatkan potensi diri.

Kedua kualitas layanan dilihat dari sarana dan prasarana Satpol PP Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini sarana dan prasarana sudah cukup. Mempunyai truk dua, punya mobil patroli, tril, mobil panwal, dan semua untuk unsur eselon tiga sudah terpenuhi mobil dinas dan juga masih ada beberapa mobil yang di pakai untuk operasi. Hal ini akan berdampak pada tugasnya akan maksimal karna sarana dan prasarana memadai.

Ketiga kualitas layanan bisa dilihat dari kepuasan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat hasil dari tingkat keberhasilan suatu organisasi publik dalam menjalankan suatu programnya yaitu kepuasan masyarakat dalam hal ini dimana masyarakat khususnya usaha mikro ataupun pengunjung sudah merasa puas dengan sikap ramah tama yang diberikan Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam

melaksanakan tugasnya yaitu kegiatan operasi protokol kesehatan. Masyarakat juga puas dengan kinerja yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, seperti halnya dalam melaksanakan tugasnya tidak menggunakan kekerasan, serta bagi masyarakat yang tidak memakai masker maka petugas akan memberikan masker gratis kepada masyarakat dengan tujuan mematuhi protokol kesehatan.

3. Responsivitas

Responsivitas Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mengenali kebutuhan masyarakat usaha mikro sebenarnya sudah dapat dikatakan baik yaitu Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro bekerjasama dengan Polres dan Polda Jatim dengan terus memberikan sosialisasi dan edukasi serta merangkul masyarakat agar senantiasa sadar bahwa pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Jika dilihat dari program dan prioritas Satpol PP Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat usaha mikro sudah baik serta dalam kegaiatn operasi protokol kesehatan PPKM mikro ini disertai pemberian sosialisasi dan edukasi serta membagikan masker kepada masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat usaha dengan tujuan mengantisipasi penularan virus Covid-19, serta memberikan leaflet supaya menjaga jarak dan penempelan pamflet terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menegakan peraturan perundang-undangan, bekerjasama dengan Polri dan Polda Jatim dalam mengambil tindakan hukum dan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan.

Satpol PP Provinsi Jawa Timur turun langsung dalam penertiban protokol kesehatan PPKM mikro bersama Polri dan Polda Jatim guna menindak lanjut sanksi bagi usaha mikro dan pengunjung. Pada fakta dilapangan bahwasannya masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Satpol PP Provinsi Jawa Timur lebih tegas dalam menertibkan protokol kesehatan dan dalam prosedur yang sudah ada bagi pelanggaran protokol kesehatan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Satpol PP Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Ada beberapa hasil kerja nyata dari pertanggungjawaban Satpol PP Provinsi Jawa timur kepada masyarakat usaha mikro dengan menertibkan terkait pentingnya penerapan dan penaatan protokol kesehatan dengan mengurangi kerumunan di tempat-tempat umum seperti caffe, warkop, tempat karaoke dan lain sebaginya guna menghindari penularan virus Covid-19 sudah baik. Namum kembali lagi pada tingkat kesadaran masyarakt dalam penarapan protokol kesehatan, maka dari itu pemberian sosialisasi dan edukasi itu yang dibutuhkan masyarakat.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Satpol PP Provinsi Jawa timur dalam melaksanakan tugasnya terdapat hambatan-hambatan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro antara lain:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat usaha mikro terkait perda dan pergub guna menghindari kerumuanan pengunjung.

b. Masyarakat yang rendah akan kesadaran terhadap pematuhan protokol kesehatan guna menghindari penularan virus Covid-19, sehingga Satpol PP Provinsi Jawa Timur harus lebih sabar dan tak henti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Satpol PP Provinsi Jawa Timur sangat kurang, yang seharunya 20 orang PPNS tapi yang dimiliki hanya 5 orang PPNS karena cakupan wilayang yang luas yaitu sejatim.

Selain faktor penghambat adapula faktor pendukung dari kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam operasi protokol kesehatan PPKM mikro. Faktor pendukung merupakan faktor yang menggambarkan suatu dorongan atau dukungan dalam melacarkan suatu kegiatan, seperti halnya kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memiliki faktot pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan yang ditentukan.

Faktor pendukung Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro antara lain:

a. Sarana dan prasarana yang telah memadai dalam pelaksanaan kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro.
b. Kinerja pegawai yang telah mumpuni dalam pelaksanakan tugas dengan baik berdasarkan tujuan yang ditentukan.
c. Dalam melakukan kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro Satpol PP Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Polres dan Polda Jatim sehingga lebih efektiv dalam melaksanakan tugas.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur serta faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan tugas penertiban prokes di masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro dapat dilihat dari lima indikator kinerja yaitu:

- Produktivitas kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPK mikro sudah baik dalam hal menertibkan masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan, namun dalam pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih kurang efektiv dapat dilihat bahwa masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
- Kualitas layanan Satpol PP Provinsi Jawa timur dilihat dari sarana dan prasarana sudah memadai dalam menunjang kegiatan operasi protokol kesehatan dan SDM berdasarkan tingkat golongan cukup baik. Namun secara keseluruhan kualitas layanan publik khususnya masyarakat usaha mikro maupun pengunjung sudah baik dengan sikap ramah tamah dan tidak arogan kepada masyarakat.
- Responsivitas Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mengenali kebutuhan masyarakat sudah baik. Dan dari segi pengembangan program-program dan prioritas terhadap usaha mikro juga sudah dapat dikatakan baik.

- Responsibilitas Satpol PP Provinsi Jawa Timur kurang tegas dalam menjalankan prosedur penertiban protokol kesehatan dilihat masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
- Akuntabilitas Satpol PP Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik dalam hal pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah dengan penertiban protokol kesehatan guna mengantisipasi penularan virus Covid-19 serta melaporkan hasil kegiatan secara periodik.

2. Faktor penghambat dan pendukung kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yaitu dari segi kendala menunjukkan masih kurangnya SDM serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan. Selanjutnya dari segi pendukung kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur yaitu dari segi sarana dan prasarana yang memadai, pegawai yang mumpuni dalam penjalankan tugas serta dalam kegiatan operasi protokol kesehatan bekerjasama dengan Polres dan Polda Jatim.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto. (2006). Reformasi Birokrasi Punlik di Indonesia. Gadja Mada University Press: Yogyakarta.

Dasar Hukum PP Nomor 6 Tahun 2010. (2010). *Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja.* Surabaya: jdih.surabaya.go.id.

Effects, T. H. E., Organizational, O. F., Behaviour, C., Mediator, A. S., Culture, O., Development, C., Improve, T. O., Of, P., Pp, S., & Dki, A. T. (2020). *THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR AS MEDIATOR ON*. *1*(5), 625–637. https://doi.org/10.31933/DIJEMSS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. (2021). *PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI SATPOL PP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.* Surabaya: Jdihn.go.id.

Rizky, H.A. (2017). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kecamatan Gubeng Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Surabaya

Sendy. (2021, maret 16). *TUGAS POKOK DAN FUNGSI*. Retrieved maret 16, 2021, from satpolpp.surabaya: https://satpolpp.surabaya.go.id/p/tugas-pokok-dan-fungsi.html

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta: Bandung.